

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN
2023

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN

JALAN RAYA PARIGI, DESA KARANGBENDA, KECAMATAN PARIGI 46393



KABUPATEN
PANGANDARAN



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB. I	Pendahuluan	1
	1.1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan	1
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	3
BAB. II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	5
	2.1. Ekonomi Makro	5
	2.2. Kebijakan Keuangan	5
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	5
BAB. III	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	9
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	9
	3.2. Hambatan dan Kendala	18
BAB. IV	Kebijakan Akuntansi	19
	4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	19
	4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	19
	4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	20
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	24
BAB. V	Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	30
	5.1. Laporan Realisasi Anggaran	30
	5.2. Neraca	35
	5.3. Laporan Operasional	44
	5.4. Laporan Perubahan Ekuitas	49
BAB. VI	Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan	53
BAB. VII	Penutup	56

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Raya Parigi – Karangbenda Tlp/Fax. (0265) 7500518 Parigi – Pangandaran

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2023 telah dapat disusun. Laporan Keuangan tersebut disusun sebagai Implementasi dari amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan-peraturan Perundangan lainnya yang menyangkut tanggung jawab Pengelolaan Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berpedoman pada Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2023 terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, LRA, LO, LPE per 31 Desember 2023 dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami yakin Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini masih jauh dari sempurna, baik redaksi maupun substansinya. Untuk itu perlu adanya perbaikan secara konstruktif agar sistem pelaporan keuangan ini lebih baik pada periode yang akan datang.

Demikian, semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 02 Januari 2024
PENGGUNA ANGGARAN
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
SKPD : 2.16.2.20.2.21.01. - DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023

1 - 3

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	374.739.700,00	351.307.964,00	93,75	362.271.324,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	374.739.700,00	351.307.964,00	93,75	362.271.324,00
4.1.02.	Retribusi Daerah	374.739.700,00	351.307.964,00	93,75	362.271.324,00
4.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	374.739.700,00	351.307.964,00	93,75	362.271.324,00
4.1.02.01.13.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	374.739.700,00	351.307.964,00	93,75	362.271.324,00
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	374.739.700,00	351.307.964,00	93,75	362.271.324,00
5.	BELANJA DAERAH	4.437.805.656,00	3.428.782.839,00	77,26	4.085.992.393,00
5.1.	BELANJA OPERASI	4.310.505.656,00	3.428.782.839,00	79,54	4.017.095.828,00
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.712.778.747,00	2.083.551.951,00	76,81	2.402.696.717,00
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.594.854.747,00	1.372.302.983,00	86,05	1.328.806.661,00
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.125.632.437,00	991.093.526,00	88,05	970.085.103,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	1.125.632.437,00	991.093.526,00	88,05	970.085.103,00
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	117.110.306,00	101.282.336,00	86,48	94.276.591,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	117.110.306,00	101.282.336,00	86,48	94.276.591,00
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	114.791.500,00	96.110.000,00	83,73	99.350.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	114.791.500,00	96.110.000,00	83,73	99.350.000,00
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	46.392.000,00	30.840.000,00	66,48	24.360.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	46.392.000,00	30.840.000,00	66,48	24.360.000,00
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.425.000,00	32.500.000,00	80,40	31.305.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.425.000,00	32.500.000,00	80,40	31.305.000,00
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	75.584.754,00	65.395.260,00	86,52	60.543.120,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	75.584.754,00	65.395.260,00	86,52	60.543.120,00
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.880.000,00	3.686.356,00	62,69	3.542.017,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.880.000,00	3.686.356,00	62,69	3.542.017,00
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.242,00	15.411,00	80,09	15.021,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.242,00	15.411,00	80,09	15.021,00
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	57.541.527,00	43.162.029,00	75,01	38.077.130,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	57.541.527,00	43.162.029,00	75,01	38.077.130,00
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.869.455,00	2.054.532,00	71,60	1.813.151,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.869.455,00	2.054.532,00	71,60	1.813.151,00
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.608.526,00	6.163.533,00	71,60	5.439.528,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.608.526,00	6.163.533,00	71,60	5.439.528,00
5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	959.812.000,00	611.168.968,00	63,68	910.850.056,00
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	756.218.213,00	488.278.605,00	64,57	756.574.877,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	756.218.213,00	488.278.605,00	64,57	756.574.877,00
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	769.395,00	769.395,00	100,00	9.232.739,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	769.395,00	769.395,00	100,00	9.232.739,00
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	202.824.392,00	122.120.968,00	60,21	145.042.440,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	202.824.392,00	122.120.968,00	60,21	145.042.440,00
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.112.000,00	100.080.000,00	63,30	163.040.000,00
5.1.01.03.02.	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.000.000,00	-	-	-
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.000.000,00	-	-	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	130.032.000,00	92.880.000,00	71,43	151.840.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	130.032.000,00	92.880.000,00	71,43	149.340.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	-	-	2.500.000,00
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.080.000,00	7.200.000,00	71,43	11.200.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.080.000,00	7.200.000,00	71,43	11.200.000,00
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.597.726.909,00	1.345.230.888,00	84,20	1.614.399.111,00
5.1.02.01.	Belanja Barang	96.398.934,00	90.627.902,00	94,01	129.530.865,00
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	96.398.934,00	90.627.902,00	94,01	129.530.865,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-	-	860.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.166.476,00	55.490.000,00	95,40	55.840.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	399.200,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.560.111,00	10.546.152,00	99,87	18.661.665,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.744.000,00	7.062.750,00	91,20	5.710.500,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	2.820.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	527.340,00	518.000,00	98,23	714.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	-	-	-	22.500.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	997.007,00	923.000,00	92,58	2.059.500,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.500.000,00	500.000,00	33,33	1.888.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.700.000,00	3.700.000,00	78,72	14.990.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.204.000,00	888.000,00	73,75	3.088.000,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	-
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.342.198.975,00	1.112.206.055,00	82,86	1.324.605.746,00
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.231.198.975,00	1.001.206.055,00	81,32	1.177.555.746,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-	-	21.900.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-	100.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	33.600.000,00	10.500.000,00	31,25	21.500.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	50.400.000,00	31.500.000,00	62,50	45.900.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.600.000,00	13.500.000,00	62,50	19.500.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	337.200.000,00	201.000.000,00	59,61	293.550.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	414.000.000,00	413.900.000,00	99,98	433.900.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	118.574.475,00	95.766.325,00	80,76	85.358.711,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000,00	12.900.000,00	71,67	15.360.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	231.824.500,00	219.161.830,00	94,54	237.566.785,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	500.000,00	130.000,00	26,00	205.350,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.500.000,00	2.847.900,00	51,78	2.714.900,00
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	43.050.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	-	-	11.050.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	-	-	-	2.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	-	-	-	30.000.000,00
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	111.000.000,00	111.000.000,00	100,00	104.000.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	111.000.000,00	111.000.000,00	100,00	100.000.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	-	-	-	4.000.000,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	38.250.000,00	30.143.125,00	78,81	17.935.000,00
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.250.000,00	30.143.125,00	78,81	17.935.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	34.500.000,00	27.243.125,00	78,97	11.460.000,00

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
1	2	3	4	5	6
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	-	550.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.250.000,00	1.400.000,00	62,22	3.675.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	2.250.000,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	120.879.000,00	112.253.806,00	92,86	142.327.500,00
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.879.000,00	112.253.806,00	92,86	142.327.500,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.984.000,00	102.358.806,00	92,23	83.427.500,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.895.000,00	9.895.000,00	100,00	43.900.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	15.000.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	127.300.000,00	-	-	68.896.565,00
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.300.000,00	-	-	68.896.565,00
5.2.02.05.	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	36.896.565,00
5.2.02.05.01.	Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	30.996.565,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	-	-	30.996.565,00
5.2.02.05.02.	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	5.900.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	-	-	-	5.900.000,00
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	127.300.000,00	-	-	32.000.000,00
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	23.550.000,00	-	-	32.000.000,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	23.550.000,00	-	-	32.000.000,00
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	103.750.000,00	-	-	-
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	103.750.000,00	-	-	-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(4.063.065.956,00)	(3.077.474.875,00)	75,74	(3.723.721.069,00)

Parigi, 31 Desember 2023
PENGGUNA ANGGARAN
DISKOMINFO
STATISTIK DAN PERSANGKAPAN
AJAJA MURULHUDA, ST., M.Dev.Plg



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

(Dalam rupiah)

REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
7.	PENDAPATAN DAERAH-LO	329.930.782,00	384.362.728,00	(54.431.946,00)	(14,16)
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	329.930.782,00	384.362.728,00	(54.431.946,00)	(14,16)
7.1.02.	Retribusi Daerah-LO	329.930.782,00	384.362.728,00	(54.431.946,00)	(14,16)
7.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum-LO	329.930.782,00	384.362.728,00	(54.431.946,00)	(14,16)
7.1.02.01.13.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO	329.930.782,00	384.362.728,00	(54.431.946,00)	(14,16)
7.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	329.930.782,00	384.362.728,00	(54.431.946,00)	(14,16)
7.1.2	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	329.930.782,00	384.362.728,00	(54.431.946,00)	(14,16)
7.2	JUMLAH PENDAPATAN	329.930.782,00	384.362.728,00	(54.431.946,00)	(14,16)
8.	BEBAN DAERAH	5.069.590.472,62	5.292.424.604,36	(222.834.131,74)	(4,21)
8.1.	BEBAN OPERASI	3.781.512.476,62	3.863.036.039,36	(81.523.562,74)	(2,11)
8.1.01.	Beban Pegawai	2.283.686.677,00	2.236.848.484,00	46.838.193,00	2,09
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.382.842.517,00	1.311.791.320,00	71.051.197,00	5,42
8.1.01.01.01.	Beban Gaji Pokok ASN	1.001.633.060,00	953.574.740,00	48.058.320,00	5,04
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	1.001.633.060,00	953.574.740,00	48.058.320,00	5,04
8.1.01.01.02.	Beban Tunjangan Keluarga ASN	101.282.336,00	94.276.591,00	7.005.745,00	7,43
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	101.282.336,00	94.276.591,00	7.005.745,00	7,43
8.1.01.01.03.	Beban Tunjangan Jabatan ASN	96.110.000,00	99.350.000,00	(3.240.000,00)	(3,26)
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	96.110.000,00	99.350.000,00	(3.240.000,00)	(3,26)
8.1.01.01.04.	Beban Tunjangan Fungsional ASN	30.840.000,00	24.360.000,00	6.480.000,00	26,60
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	30.840.000,00	24.360.000,00	6.480.000,00	26,60
8.1.01.01.05.	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	32.500.000,00	30.945.000,00	1.555.000,00	5,03
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	32.500.000,00	30.945.000,00	1.555.000,00	5,03
8.1.01.01.06.	Beban Tunjangan Beras ASN	65.395.260,00	60.398.280,00	4.996.980,00	8,27
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	65.395.260,00	60.398.280,00	4.996.980,00	8,27
8.1.01.01.07.	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	3.686.356,00	3.542.017,00	144.339,00	4,08
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.686.356,00	3.542.017,00	144.339,00	4,08
8.1.01.01.08.	Beban Pembulatan Gaji ASN	15.411,00	14.883,00	528,00	3,55
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	15.411,00	14.883,00	528,00	3,55
8.1.01.01.09.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	43.162.029,00	38.077.130,00	5.084.899,00	13,35
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	43.162.029,00	38.077.130,00	5.084.899,00	13,35
8.1.01.01.10.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.054.532,00	1.813.151,00	241.381,00	13,31
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.054.532,00	1.813.151,00	241.381,00	13,31

REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.01.01.11.	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	6.163.533,00	5.439.528,00	724.005,00	13,31
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	6.163.533,00	5.439.528,00	724.005,00	13,31
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	811.884.160,00	787.707.164,00	24.176.996,00	3,07
8.1.01.02.01.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	648.886.605,00	633.431.985,00	15.454.620,00	2,44
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	648.886.605,00	633.431.985,00	15.454.620,00	2,44
8.1.01.02.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	769.395,00	9.232.739,00	(8.463.344,00)	(91,67)
8.1.01.02.03.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	769.395,00	9.232.739,00	(8.463.344,00)	(91,67)
8.1.01.02.05.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	162.228.160,00	145.042.440,00	17.185.720,00	11,85
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	162.228.160,00	145.042.440,00	17.185.720,00	11,85
8.1.01.03.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.960.000,00	137.350.000,00	(48.390.000,00)	(35,23)
8.1.01.03.07.	Beban Honorarium	82.560.000,00	127.750.000,00	(45.190.000,00)	(35,37)
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	82.560.000,00	125.250.000,00	(42.690.000,00)	(34,08)
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)	(100,00)
8.1.01.03.08.	Beban Jasa Pengelolaan BMD	6.400.000,00	9.600.000,00	(3.200.000,00)	(33,33)
8.1.01.03.08.0002	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6.400.000,00	9.600.000,00	(3.200.000,00)	(33,33)
8.1.02.	Beban Barang dan Jasa	1.488.007.570,33	1.621.595.626,00	(133.588.055,67)	(8,24)
8.1.02.01.	Beban Barang	90.168.198,00	131.922.069,00	(41.753.871,00)	(31,65)
8.1.02.01.01.	Beban Barang Pakai Habis	90.168.198,00	131.922.069,00	(41.753.871,00)	(31,65)
8.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	0,00	1.250.000,00	(1.250.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	55.490.000,00	55.840.000,00	(350.000,00)	(0,63)
8.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	0,00	399.200,00	(399.200,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.902.448,00	19.091.369,00	(6.188.921,00)	(32,42)
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	4.062.750,00	7.100.500,00	(3.037.750,00)	(42,78)
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	3.500.000,00	2.900.000,00	600.000,00	20,69
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	518.000,00	714.000,00	(196.000,00)	(27,45)
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	22.500.000,00	(22.500.000,00)	(100,00)
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.107.000,00	2.021.000,00	(914.000,00)	(45,23)
8.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	500.000,00	2.028.000,00	(1.528.000,00)	(75,35)
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.700.000,00	14.990.000,00	(11.290.000,00)	(75,32)
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	888.000,00	3.088.000,00	(2.200.000,00)	(71,24)
8.1.02.01.01.0070	Beban Pakaian Pelatihan Kerja	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	100,00
8.1.02.02.	Beban Jasa	1.255.442.441,33	1.329.411.057,00	(73.968.615,67)	(5,56)
8.1.02.02.01.	Beban Jasa Kantor	1.145.359.108,00	1.182.361.057,00	(37.001.949,00)	(3,13)

REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	21.900.000,00	(21.900.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	100.000,00	(100.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	16.800.000,00	21.500.000,00	(4.700.000,00)	(21,86)
8.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	50.400.000,00	45.900.000,00	4.500.000,00	9,80
8.1.02.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	21.600.000,00	19.500.000,00	2.100.000,00	10,77
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	316.200.000,00	293.550.000,00	22.650.000,00	7,72
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	413.900.000,00	433.900.000,00	(20.000.000,00)	(4,61)
8.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	95.204.368,00	86.369.882,00	8.834.486,00	10,23
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.900.000,00	15.360.000,00	(2.460.000,00)	(16,02)
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	215.376.840,00	241.360.925,00	(25.984.085,00)	(10,77)
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket/Pengiriman	130.000,00	205.350,00	(75.350,00)	(36,69)
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.847.900,00	2.714.900,00	133.000,00	4,90
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	43.050.000,00	(43.050.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	11.050.000,00	(11.050.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.132.	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	2.000.000,00	(2.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.04.133.	Beban Sewa Peralatan Studio Video dan Film	0,00	30.000.000,00	(30.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	110.083.333,33	104.000.000,00	6.083.333,33	5,85
8.1.02.02.05.0001	Beban Sewa Bangunan Gedung Kantor	110.083.333,33	100.000.000,00	10.083.333,33	10,08
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	4.000.000,00	(4.000.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.	Beban Pemeliharaan	30.143.125,00	17.935.000,00	12.208.125,00	68,07
8.1.02.03.02.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30.143.125,00	17.935.000,00	12.208.125,00	68,07
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00	11.460.000,00	(11.460.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27.243.125,00	0,00	27.243.125,00	100,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	550.000,00	(550.000,00)	(100,00)
8.1.02.03.02.121.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.400.000,00	3.675.000,00	(2.275.000,00)	(61,90)
8.1.02.03.02.405.	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.500.000,00	2.250.000,00	(750.000,00)	(33,33)
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas	112.253.806,00	142.327.500,00	(30.073.694,00)	(21,13)
8.1.02.04.01.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	112.253.806,00	142.327.500,00	(30.073.694,00)	(21,13)
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	102.358.806,00	83.427.500,00	18.931.306,00	22,69
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.895.000,00	43.900.000,00	(34.005.000,00)	(77,46)

REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	15.000.000,00	(15.000.000,00)	(100,00)
8.1.07.	Beban Penyisihan Piutang	9.818.229,29	4.591.929,36	5.226.299,93	113,81
8.1.07.02.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	9.818.229,29	4.591.929,36	5.226.299,93	113,81
8.1.07.02.01.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	9.818.229,29	4.591.929,36	5.226.299,93	113,81
8.1.07.02.01.0014	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	9.818.229,29	4.591.929,36	5.226.299,93	113,81
8.2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.288.077.996,00	1.429.388.565,00	(141.310.569,00)	(9,89)
8.2.01.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.234.120.451,00	1.335.924.337,00	(101.803.886,00)	(7,62)
8.2.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar	0,00	1.335.924.337,00	(1.335.924.337,00)	(100,00)
8.2.01.01.01.	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	0,00	1.335.924.337,00	(1.335.924.337,00)	(100,00)
8.2.01.01.01.0013	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	1.335.924.337,00	(1.335.924.337,00)	(100,00)
8.2.01.02.	Beban Penyusutan Alat Angkutan	56.730.934,00	0,00	56.730.934,00	100,00
8.2.01.02.01.	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	56.730.934,00	0,00	56.730.934,00	100,00
8.2.01.02.01.0009	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	56.730.934,00	0,00	56.730.934,00	100,00
8.2.01.05.	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	110.580.510,00	0,00	110.580.510,00	100,00
8.2.01.05.01.	Beban Penyusutan Alat Kantor	3.418.920,00	0,00	3.418.920,00	100,00
8.2.01.05.01.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor	3.418.920,00	0,00	3.418.920,00	100,00
8.2.01.05.02.	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	103.908.340,00	0,00	103.908.340,00	100,00
8.2.01.05.02.0006	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga (Home Use)	103.908.340,00	0,00	103.908.340,00	100,00
8.2.01.05.03.	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.253.250,00	0,00	3.253.250,00	100,00
8.2.01.05.03.0008	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	3.253.250,00	0,00	3.253.250,00	100,00
8.2.01.06.	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	566.165.169,00	0,00	566.165.169,00	100,00
8.2.01.06.01.	Beban Penyusutan Alat Studio	545.303.224,00	0,00	545.303.224,00	100,00
8.2.01.06.01.0006	Beban Penyusutan Alat Studio	545.303.224,00	0,00	545.303.224,00	100,00
8.2.01.06.02.	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	3.240.220,00	0,00	3.240.220,00	100,00
8.2.01.06.02.0011	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	3.240.220,00	0,00	3.240.220,00	100,00
8.2.01.06.03.	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	17.621.725,00	0,00	17.621.725,00	100,00
8.2.01.06.03.0048	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	17.621.725,00	0,00	17.621.725,00	100,00
8.2.01.08.	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	44.814.916,00	0,00	44.814.916,00	100,00
8.2.01.08.01.	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	43.623.250,00	0,00	43.623.250,00	100,00
8.2.01.08.01.0064	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	43.623.250,00	0,00	43.623.250,00	100,00
8.2.01.08.08.	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1.191.666,00	0,00	1.191.666,00	100,00
8.2.01.08.08.0016	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	1.191.666,00	0,00	1.191.666,00	100,00
8.2.01.10.	Beban Penyusutan Komputer	454.223.255,00	0,00	454.223.255,00	100,00
8.2.01.10.01.	Beban Penyusutan Komputer Unit	74.898.145,00	0,00	74.898.145,00	100,00

REKENING	URAIAN	2023	2022	Kenaikan / Penurunan	(%)
1	2	3	4	5	6
8.2.01.10.01.0003	Beban Penyusutan Komputer Unit	74.898.145,00	0,00	74.898.145,00	100,00
8.2.01.10.02.	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	379.325.110,00	0,00	379.325.110,00	100,00
8.2.01.10.02.0005	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	379.325.110,00	0,00	379.325.110,00	100,00
8.2.01.15.	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	1.605.667,00	0,00	1.605.667,00	100,00
8.2.01.15.01.	Beban Penyusutan Alat Deteksi	1.605.667,00	0,00	1.605.667,00	100,00
8.2.01.15.01.0003	Beban Penyusutan Alat Deteksi	1.605.667,00	0,00	1.605.667,00	100,00
8.2.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	28.344.925,00	28.344.925,00	0,00	0,00
8.2.02.01.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	28.344.925,00	28.344.925,00	0,00	0,00
8.2.02.01.01.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.344.925,00	28.344.925,00	0,00	0,00
8.2.02.01.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	0,00	28.344.925,00	(28.344.925,00)	(100,00)
8.2.02.01.01.300.	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	28.344.925,00	0,00	28.344.925,00	100,00
8.2.03.	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.307.620,00	6.307.620,00	0,00	0,00
8.2.03.01.	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0,00	6.307.620,00	(6.307.620,00)	(100,00)
8.2.03.01.01.	Beban Penyusutan Jalan	0,00	6.307.620,00	(6.307.620,00)	(100,00)
8.2.03.01.01.0011	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	6.307.620,00	(6.307.620,00)	(100,00)
8.2.03.04.	Beban Penyusutan Jaringan	6.307.620,00	0,00	6.307.620,00	100,00
8.2.03.04.02.	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	6.307.620,00	0,00	6.307.620,00	100,00
8.2.03.04.02.0003	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	6.307.620,00	0,00	6.307.620,00	100,00
8.2.06.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	19.305.000,00	58.811.683,00	(39.506.683,00)	(67,17)
8.2.06.01.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	19.305.000,00	58.811.683,00	(39.506.683,00)	(67,17)
8.2.06.01.01.	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	19.305.000,00	58.811.683,00	(39.506.683,00)	(67,17)
8.2.06.01.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	58.811.683,00	(58.811.683,00)	(100,00)
8.2.06.01.01.0007	Beban AMortisasi Aset Tidak Berwujud -	19.305.000,00	0,00	19.305.000,00	100,00
8.2	JUMLAH BEBAN	5.069.590.472,62	5.292.424.604,36	(222.834.131,74)	(4,21)
	SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI	(4.739.659.690,62)	(4.908.061.876,36)	168.402.185,74	(3,43)

Parigi, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	2	3	4
1.3.02.06.03.0003.	Peralatan Pemancar VHF/FM	3.850.000,00	3.850.000,00
1.3.02.06.03.0019.	Switcher Antena	34.667.600,00	34.667.600,00
1.3.02.06.03.0020.	Switcher/Menara Antena	117.474.000,00	117.474.000,00
1.3.02.06.03.0047.	Sumber Tenaga	20.225.646,00	20.225.646,00
1.3.02.08.	Alat Laboratorium	286.634.918,00	286.634.918,00
1.3.02.08.01.0013.	Alat Laboratorium Kimia	52.652.000,00	52.652.000,00
1.3.02.08.01.0015.	Alat Laboratorium Immunologi	130.362.918,00	130.362.918,00
1.3.02.08.03.0006.	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:IPA Atas	89.320.000,00	89.320.000,00
1.3.02.08.08.0006.	Peralatan Umum	14.300.000,00	14.300.000,00
1.3.02.09.	Alat Persenjataan	21.882.519,00	21.882.519,00
1.3.02.09.04.0004.	Peralatan Deteksi Intel	14.635.000,00	14.635.000,00
1.3.02.09.04.0007.	Alsus Fotografi Kepolisian	4.097.519,00	4.097.519,00
1.3.02.09.04.0009.	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	3.150.000,00	3.150.000,00
1.3.02.10.	Komputer	2.337.436.145,00	2.337.436.145,00
1.3.02.10.01.0001.	Komputer Jaringan	86.448.112,00	86.448.112,00
1.3.02.10.01.0002.	Personal Computer	416.411.636,00	416.411.636,00
1.3.02.10.01.0003.	Komputer Unit Lainnya	32.000.000,00	32.000.000,00
1.3.02.10.02.0002.	Peralatan Mini Computer	34.097.000,00	34.097.000,00
1.3.02.10.02.0003.	Peralatan Personal Computer	856.978.462,00	856.978.462,00
1.3.02.10.02.0004.	Peralatan Jaringan	911.500.935,00	911.500.935,00
1.3.03.	Gedung dan Bangunan	1.133.797.000,00	1.133.797.000,00
1.3.03.01.	Bangunan Gedung	1.133.797.000,00	1.133.797.000,00
1.3.03.01.01.0001.	Bangunan Gedung Kantor	1.133.797.000,00	1.133.797.000,00
1.3.04.	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	189.228.600,00	189.228.600,00
1.3.04.04.	Jaringan	189.228.600,00	189.228.600,00
1.3.04.04.02.0002.	Jaringan Distribusi	19.228.600,00	19.228.600,00
1.3.04.04.02.0003.	Jaringan Listrik Lainnya	170.000.000,00	170.000.000,00
1.3.05.	Aset Tetap Lainnya	117.025.000,00	117.025.000,00
1.3.05.01.	Bahan Perpustakaan	41.650.000,00	41.650.000,00
1.3.05.01.01.0007.	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	41.650.000,00	41.650.000,00
1.3.05.07.	Aset Tetap Dalam Renovasi	75.375.000,00	75.375.000,00
1.3.05.07.01.0001.	Aset Tetap Dalam Renovasi	75.375.000,00	75.375.000,00
1.3.07.	Akumulasi Penyusutan	(6.181.114.978,00)	(4.922.848.441,00)
1.3.07.01.	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.038.692.083,00)	(4.815.078.091,00)
1.3.07.01.02.0009.	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	(490.291.472,00)	(433.560.538,00)
1.3.07.01.03.0044.	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	(6.050.000,00)	(6.050.000,00)
1.3.07.01.05.0005.	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	(59.377.920,00)	(56.514.333,00)
1.3.07.01.05.0011.	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(583.160.822,00)	(486.544.034,00)
1.3.07.01.05.0021.	Akumulasi Penyusutan Meja dan kursi kerja/rapat pejabat	(74.518.702,00)	(72.829.452,00)
1.3.07.01.06.0006.	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	(2.113.938.225,00)	(1.569.300.835,00)
1.3.07.01.06.0017.	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	(49.877.091,00)	(46.636.871,00)
1.3.07.01.06.0065.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya	(136.560.999,00)	(118.939.274,00)

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	2	3	4
1.3.07.01.08.0064.	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium- Unit Alat Laboratorium Lainnya	(147.414.605,00)	(103.791.355,00)
1.3.07.01.08.0086.	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	(89.320.000,00)	(89.320.000,00)
1.3.07.01.08.128.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hydrodinamica-Peralatan Laboratorium Hydrodinamica Lainnya	(8.440.972,00)	(7.249.306,00)
1.3.07.01.10.0003.	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	(519.545.901,00)	(445.077.496,00)
1.3.07.01.10.0008.	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	(1.739.100.355,00)	(1.359.775.245,00)
1.3.07.01.15.0003.	Akumulasi Penyusutan Alat Deteksi-Alat Deteksi Lainnya	(21.095.019,00)	(19.489.352,00)
1.3.07.02.	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(115.741.777,00)	(87.396.852,00)
1.3.07.02.01.0030.	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	(115.741.777,00)	(87.396.852,00)
1.3.07.03.	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(26.681.118,00)	(20.373.498,00)
1.3.07.03.04.0008.	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	(26.681.118,00)	(20.373.498,00)
1.5.	ASET LAINNYA	17.696.250,00	37.001.250,00
1.5.03.	Aset Tidak Berwujud	758.851.426,00	758.851.426,00
1.5.03.01.	Aset Tidak Berwujud	758.851.426,00	758.851.426,00
1.5.03.01.01.0005.	Software	642.816.426,00	642.816.426,00
1.5.03.01.01.0006.	Kajian	116.035.000,00	116.035.000,00
1.5.05.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(741.155.176,00)	(721.850.176,00)
1.5.05.01.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(741.155.176,00)	(721.850.176,00)
1.5.05.01.01.0004.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-	(741.155.176,00)	(721.850.176,00)
	JUMLAH ASET	2.008.453.530,59	3.329.154.408,21
2.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	390.800.426,20	46.512.647,20
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	390.800.426,20	46.512.647,20
2.1.05.	Pendapatan Diterima Dimuka	317.291,20	317.291,20
2.1.05.02.	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	317.291,20	317.291,20
2.1.05.02.01.0002.	Pendapatan diterima di muka	317.291,20	317.291,20
2.1.06.	Utang Belanja	390.483.135,00	46.195.356,00
2.1.06.01.	Utang Belanja Pegawai	233.361.804,00	33.227.078,00
2.1.06.01.01.0001.	Utang Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	32.646.612,00	22.107.078,00
2.1.06.01.02.0001.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	160.608.000,00	0
2.1.06.01.02.0009.	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	40.107.192,00	0
2.1.06.01.03.0051.	Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0	10.320.000,00
2.1.06.01.03.0055.	Utang Belanja Jasa Pengelolaan BMD-Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	800.000,00
2.1.06.02.	Utang Belanja Barang dan Jasa	157.121.331,00	12.968.278,00
2.1.06.02.02.0030.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kebersihan	6.300.000,00	0
2.1.06.02.02.0031.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Keamanan	18.900.000,00	0
2.1.06.02.02.0033.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Supir	8.100.000,00	0
2.1.06.02.02.0039.	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	115.200.000,00	0

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)	
		2023	2022
1	2	3	4
2.1.06.02.02.0061.	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	7.658.181,00	8.220.138,00
2.1.06.02.02.0063.	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	963.150,00	4.748.140,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	390.800.426,20	46.512.647,20
3.	EKUITAS	1.617.653.104,39	3.282.641.761,01
3.1.	EKUITAS	1.617.653.104,39	3.282.641.761,01
3.1.01.	Ekuitas	(1.457.017.929,61)	3.282.641.761,01
3.1.01.01.	Ekuitas	3.282.641.761,01	3.282.641.761,01
3.1.01.01.01.0001.	Ekuitas	3.282.641.761,01	3.282.641.761,01
3.1.01.02.	Surplus/Defisit-LO	(4.739.659.690,62)	0
3.1.01.02.01.0001.	Surplus/Defisit-LO	(4.739.659.690,62)	0
3.1.03.	RK PPKD	3.077.474.875,00	0
3.1.03.01.	RK PPKD	3.077.474.875,00	0
3.1.03.01.01.0001.	RK PPKD	3.077.474.875,00	0
3.1.04.	Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar/Koreksi Kesalahan	(2.803.841,00)	0
3.1.04.01.	Dampak Kumulatif Perubahan Mendasar/Koreksi Kesalahan	(2.803.841,00)	0
3.1.04.01.01.0005.	Dampak kumulatif-Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	10.506.459,00	0
3.1.04.01.01.0009.	Dampak kumulatif Pencatatan Nilai Peralatan dan Mesin	(13.310.300,00)	0
3.Z	JUMLAH EKUITAS	1.617.653.104,39	3.282.641.761,01
3.ZZ	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.008.453.530,59	3.329.154.408,21

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

URAIAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	3,282,641,761.01	3,282,641,761.01
Surplus/Defisit-LO	(4,739,659,690.62)	0.00
RK PPKD	3,077,474,875.00	0.00
Dampak kumulatif-Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin	10,506,459.00	0.00
Dampak kumulatif Pencatatan Nilai Peralatan dan Mesin	(13,310,300.00)	0.00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	1,617,653,104.39	3,282,641,761.01

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada semester pertama tahun anggaran 2023 telah mengacu ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2023 tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD sesuai dengan ketentuan tersebut maka seluruh SKPD sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya masing-masing.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas;
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan yang meliputi realisasi anggaran, neraca, arus kas, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran atas pelaksanaan APBD Tahun 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi makro
- 2.2. Kebijakan keuangan
- 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab IV Kebijakan akuntansi

- 4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

- 5.1. Pos – Pos Belanja LRA
- 5.2. Pos – Pos Neraca
- 5.3. Pos – Pos Laporan Operasional (LO)
- 5.4. Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB. II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD

2.1. EKONOMI MAKRO

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN, dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 dijelaskan keuangannya mencakup unsur Belanja yang terdiri dari Belanja Langsung, yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa.

Belanja tersebut dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran pada Tahun Anggaran 2023.

1.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Adapun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian termasuk dalam urusan wajib pemerintahan umum.

Program, kegiatan dan sub kegiatan urusan wajib pemerintahan umum yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 yaitu sebagai berikut:

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Indikator Kinerja Keluaran
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik

	3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase dokumen penganggaran kinerja yang disusun tepat waktu 3. Persentase dokumen evaluasi yang disusun tepat waktu
Peyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik
Penatausahaan Barang Milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
Adminisitrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Persentase peningkatan retribusi yang diterima perangkat daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengelolaan retribusi daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang baik
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang baik
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah yang terealisasi
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Uursan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemeirntahan yang disediakan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Tingkat kematangan tata kelola SPBE
Pengelolaan E-government di ingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase OPD yang memiliki layanan publik berbasis sistem elektronik
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1. Persentase tata kelola layanan informasi publik 2. Persentase tata kelola komunikasi publik
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase ketersediaan konten yang dipublikasikan 2. Persentase pengelolaan media massa dan lainnya
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam

	mendiseminasikan informasi program atau kebijakan
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase publikasi data statistik sektoral
Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang dipublikasikan
Pengembangan infrastruktur	Jumlah infrastruktur statistik sektoral yang dikelola
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMAN INFORMASI	Persentase sistem informasi dan data elektronik yang aman
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prosedur komunikasi sandi antar perangkat daerah yang disusun
Operaisionalisasi Jaring Komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

BAB. III
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1.1. Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Program Belanja Daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.437.805.656,00 terealisasi sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.428.782.839,00. Hasil pelaksanaan Program Belanja Daerah tersebut adalah masih rendah tingkat kinerja yang dicapai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Struktur Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program, kegiatan dan sub kegiatan selama pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan tersebut diambil dari tabel pengukuran kinerja kegiatan dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas.

Adapun uraian kinerja program dan kegiatan disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini sesuai dengan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran yaitu Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan, sebagai berikut:

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran 2023 (Rp.)	Realisasi 2023 (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
	Belanja Daerah	4.437.805.656	3.428.782.839	1.009.022.817	77,26
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.579.326.466	2.800.886.881	778.439.585	78,25
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah/Kota	20.400.000	12.750.000	7.650.000	62,50
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.400.000	12.750.000	7.650.000	62,50
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.733.178.747	2.096.301.951	636.876.796	76,70
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	2.712.778.747	2.083.551.951	629.226.796	76,80
	Pelaksanaan Penatausahaan Pengujia/Verifikasi Keuangan SKPD	20.400.000	12.750.000	7.650.000	62,50
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.400.000	12.750.000	7.650.000	62,50
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.400.000	12.750.000	7.650.000	62,50
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	19.200.000	12.000.000	7.200.000	62,50

	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Dacrah	19.200.000	12.000.000	7.200.000	62,50
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.800.000	10.500.000	6.300.000	62,50
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	16.800.000	10.500.000	6.300.000	62,50
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	91.728.268	80.657.750	204.050.929	87,93
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	527.340	518.000	9.340	98,23
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.039.921	10.026.000	13.921	99,86
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	997.007	923.000	74.007	92,58
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.194.000	6.512.750	681.250	90,53
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.000.000	12.900.000	5.100.000	71,67
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.970.000	49.778.000	5.192.000	90,55
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.000.000	111.000.000	-	100,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	111.000.000	111.000.000	-	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	464.702.975	376.446.155	88.256.820	81,00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.630.000	370.000	90,75
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.398.975	314.928.155	35.470.820	89,88
	Penyediaan Jasa Pelayan Umum Daerah	110.304.000	57.888.000	52.416.000	52,48
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.916.476	88.481.025	103.373.472	86,82
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	82.798.360	74.650.500	8.147.860	90,16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.368.116	10.930.525	4.437.591	71,12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.750.000	2.900.000	850.000	77,33
II	Program Informasi dan Komunikasi Publik	501.637.190	489.807.452	11.829.738	97,64
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	501.637.190	489.807.452	11.829.738	97,64
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	22.325.000	16.475.000	5.850.000	73,80
	Pelayanan Informasi Publik	15.600.000	9.750.000	5.850.000	62,50
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	463.712.190	463.582.452	129.738	99,97
III	Program Aplikasi Informatika	324.056.000	115.000.000	209.056.000	35,49

	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	324.056.000	115.000.000	209.056.000	35,49
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	120.000.000	67.500.000	52.500.000	56,25
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	204.056.000	47.500.000	156.556.000	23,28
IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	15.986.000	12.588.506	3.397.494	78,75
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	15.986.000	12.588.506	3.397.494	78,75
	Pengembangan Infrastruktur	15.986.000	12.588.506	3.397.494	78,75
V	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	16.800.000	10.500.000	6.300.000	62,50
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	16.800.000	10.500.000	6.300.000	62,50
	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.800.000	10.500.000	6.300.000	62,50

Tabel 3.1
Rincian Belanja Langsung
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran untuk Tahun 2023 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.579.326.466,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 2.800.886.881,00 atau 78,25%, sisa pagu anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 778.439.585,00.

Adapun rincian Kegiatan dari Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Daerah/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 20.400.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.750.000,00 dengan persentase 62,50%;
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.733.178.747,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 2.096.301.951,00 dengan persentase 76,70%;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 20.400.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.750.000,00 dengan persentase 62,50%;

4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 19.200.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.000.000,00 dengan persentase 62,50%;
5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 16.800.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.500.000,00 dengan persentase 62,50%;
6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 91.728.268,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 80.657.750,00 dengan persentase 87,93%;
7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 111.000.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 111.000.000,00 dengan persentase 100%;
8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 464.702.975,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 376.446.155,00 dengan persentase 81,00%;
9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 101.916.476,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 88.481.025,00 dengan persentase 86,82%.

b. Program Informasi dan Komunikasi Publik

Anggaran untuk Tahun 2023 Program Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp. 501.637.190,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 489.807.452,00 atau 97,64%, sisa pagu anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 11.829.738,00.

Adapun Kegiatan dari Program Informasi dan Komunikasi Publik adalah Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 501.637.190,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 489.807.452,00 atau 97,64%.

c. Program Aplikasi Informatika

Anggaran untuk Tahun 2023 Program Aplikasi Informatika sebesar Rp. 324.056.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 115.000.000,00 atau sebesar 35,49%, sisa pagu anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 209.056.000,00.

Adapun Kegiatan dari Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.

324.056.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 115.000.000,00 atau sebesar 35,49%.

d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Anggaran untuk Tahun 2023 Program Penyelenggara Statistik dan Sektoral sebesar Rp. 15.986.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.588.506,00 atau sebesar 78,75%, sisa pagu anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 3.397.494,00.

Adapun Kegiatan dari Program Aplikasi Penyelenggara Statistik dan Sektoral Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 15.986.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.588.506,00 atau sebesar 78,75%.

e. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Anggaran untuk Tahun 2023 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp. 16.800.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.500.000,00 atau sebesar 62,50%, sisa Pagu Anggaran untuk Program ini sebesar Rp. 6.300.000,00.

Adapun Kegiatan dari Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 16.800.000,00 realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 10.500.000,00 atau sebesar 62,50%.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Antar Periode

3.1.2.1 Pendapatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	374.739.700	351.307.964	93,75
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	374.739.700	351.307.964	93,75
4.1.2	Retribusi Daerah	374.739.700	351.307.964	93,75
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	374.739.700	351.307.964	93,75
4.1.2.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	374.739.700	351.307.964	93,75

Tabel 3.2
Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

3.1.2.2 Belanja

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2023	%
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	4.437.805.656	3.428.782.839	77,26
5.1	BELANJA OPERASI	4.310.505.656	3.428.782.839	79,54
5.1.01.	Belanja Pegawai	2.712.778.747	2.083.551.951	76,81
5.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.594.854.747	1.372.302.983	86,05
5.1.01.01.01.	Belanja Gaji Pokok ASN	1.125.632.437	991.093.526	88,05
5.1.01.01.01.0001.	Belanja Gaji Pokok PNS	1.125.632.437	991.093.526	88,05
5.1.01.01.02.	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	117.110.306	101.282.336	86,48
5.1.01.01.02.0001.	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	117.110.306	101.282.336	86,48
5.1.01.01.03.	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	114.791.500	96.110.000	83,73
5.1.01.01.03.0001.	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	114.791.500	96.110.000	83,73
5.1.01.01.04.	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	46.392.000	30.840.000	66,48
5.1.01.01.04.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	46.392.000	30.840.000	66,48
5.1.01.01.05.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	40.425.000	32.500.000	80,40
5.1.01.01.05.0001.	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	40.425.000	32.500.000	80,40
5.1.01.01.06.	Belanja Tunjangan Beras ASN	75.584.754	65.395.260	86,52
5.1.01.01.06.0001.	Belanja Tunjangan Beras PNS	75.584.754	65.395.260	86,52
5.1.01.01.07.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.880.000	3.686.356	62,69
5.1.01.01.07.0001.	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.880.000	3.686.356	62,69
5.1.01.01.08.	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.242	15.411	80,09
5.1.01.01.08.0001.	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.242	15.411	80,09
5.1.01.01.09.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	59.541.527	43.162.029	75,01
5.1.01.01.09.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	59.541.527	43.162.029	75,01
5.1.01.01.10.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.869.455	2.054.532	71,60
5.1.01.01.10.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.869.455	2.054.532	71,60
5.1.01.01.11.	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	8.608.526	6.163.533	71,60
5.1.01.01.11.0001.	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	8.608.526	6.163.533	71,60

5.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	959.812.000	611.168.968	63,6
5.1.01.02.01.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	756.218.213	488.278.605	64,57
5.1.01.02.01.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	756.218.213	488.278.605	64,57
5.1.01.02.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	769.395	769.395	100
5.1.01.02.03.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	769.395	769.395	100
5.1.01.02.05.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	202.824.392	122.120.968	60,21
5.1.01.02.05.0001.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	202.824.392	122.120.968	60,21
5.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.112.000	100.080.000	63,30
5.1.01.03.02.	Belanja bagi - ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	18.000.000	-	-
5.1.01.03.02.0013.	Belanja Insentif bagi - ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	18.000.000	-	-
5.1.01.03.07.	Belanja Honorarium	130.032.000	92.880.000	71,43
5.1.01.03.07.0001.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	130.032.000	92.880.000	71,43
5.1.01.03.08.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	10.080.000	7.200.000	71,43
5.1.01.03.08.0002.	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	10.080.000	7.200.000	71,43
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	1.597.726.909	1.345.230.888	84,20
5.1.02.01.	Belanja Barang	96.398.934	90.627.902	94,01
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	96.398.934	90.627.902	94,01
5.1.02.01.01.0004.	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.166.476	55.490.000	95,40
5.1.02.01.01.0024.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.560.111	10.546.152	99,87

5.1.02.01.01.0026.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.744.000	7.062.750	91,20
5.1.02.01.01.0027.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000	3.500.000	100,00
5.1.02.01.01.0031.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	527.340	518.000	98,23
5.1.02.01.01.0036.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	997.007	923.000	92,58
5.1.02.01.01.0043.	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.500.000	500.000	33,33
5.1.02.01.01.0052.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.700.000	3.700.000	78,72
5.1.02.01.01.0053.	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.204.000	888.000	73,75
5.1.02.01.01.0070.	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	7.500.000	7.500.000	100,00
5.1.02.02.	Belanja Jasa	1.342.198.975	1.112.206.055	82,86
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	1.231.198.975	1.001.206.055	81,32
5.1.02.02.01.0030.	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	33.600.000	10.500.000	31,25
5.1.02.02.01.0031.	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	50.400.000	31.500.000	62,50
5.1.02.02.01.0033.	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.600.000	13.500.000	62,50
5.1.02.02.01.0039.	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	337.200.000	201.000.000	59,61
5.1.02.02.01.0055.	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	414.000.000	413.900.000	99,98
5.1.02.02.01.0061.	Belanja Tagihan Listrik	118.574.475	95.766.325	80,76
5.1.02.02.01.0062.	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.000.000	12.900.000	71,67
5.1.02.02.01.0063.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan	231.824.500	219.161.830	94,54
5.1.02.02.01.0064.	Belanja Paket/Pengiriman	500.000	130.000	26,00
5.1.02.02.01.0067.	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	5.500.000	2.847.900	51,78
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	111.000.000	111.000.000	100,00
5.1.02.02.05.0001.	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	111.000.000	111.000.000	100,00
5.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	38.250.000	30.143.125	78,81
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.250.000	30.143.125	78,81
5.1.02.03.02.0035.	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat	34.500.000	27.243.125	78,97

	Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan			
5.1.02.03.02.0121.	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.250.000	1.400.000	62,22
5.1.02.03.02.0405.	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.500.000	1.500.000	100,00
5.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	120.879.000	112.253.806	92,86
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.879.000	112.253.806	92,86
5.1.02.04.01.0001.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110.984.000	102.358.806	92,23
5.1.02.04.01.0003.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.895.000	9.895.000	100,00
5.2.	BELANJA MODAL	127.300.000	-	-
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.300.000	-	-
5.2.02.10.	Belanja Modal Komputer	127.300.000	-	-
5.2.02.10.01.	Belanja Modal Komputer Unit	23.550.000	-	-
5.2.02.10.01.0003.	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	23.550.000	-	-
5.2.02.10.02.	Belanja Modal Peralatan Komputer	103.750.000	-	-
5.2.02.10.02.0001.	Belanja Modal Peralatan Mainframe	103.750.000	-	-
SURPLUS/(DEFISIT)		(4.063.065.956)	(3.077.474.875)	75,74

Tabel 3.3
Rincian Realisasi Anggaran Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

3.1.2.3 Pembiayaan
Pembiayaan khusus bagi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian tidak berkompeten dalam hal Pembiayaan.

3.1.3. Rasio pos-pos Belanja Daerah

3.1.3.1 Rasio Belanja

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
BELANJA DAERAH				
Belanja Operasi	4.310.505.656,00	3.428.782.839,00	79,54	4.017.095.82,00
Belanja Modal	127.300.000,00	-	-	68.896.565,00

JUMLAH	4.437.805.656,00	3.428.782.839,00	77,26	4.085.992.393,00
--------	------------------	------------------	-------	------------------

Tabel 3.4
Rincian Rasio Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

3.2.1 Hambatan

Sehubungan dengan pelaksanaan pelaporan keuangan melalui aplikasi SIPKD secara online, kendala yang dihadapi antara lain infrastruktur Jaringan Internet yang tidak selamanya bagus (sering terjadi gangguan) sehingga menjadikan pengerjaan laporan pertanggungjawaban keuangan terlambat. Selain itu terkadang keterbatasan sumber daya manusia dapat menyebabkan terhambatnya pelaksanaan pelaporan keuangan.

3.2.2 Pemecahan Masalah

Untuk kelancaran pelaksanaan pelaporan keuangan oleh SIPKD kedepannya, diupayakan untuk tahun anggaran berikutnya perlu penambahan anggaran untuk memperkuat jaringan/ signal internet SIPKD. Untuk sumber daya manusianya diberikan pelatihan lagi agar lebih berkompeten dan berkuallitas.

BAB. IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Struktur dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran sudah mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 21 tahun 2011 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tersebut bahwa pertanggungjawaban Bupati sebagai Kepala Daerah adalah berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran adalah basis akrual penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih masih menganut basis kas sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban-LO, Surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas:

- (a) **Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran**, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
- (b) **Basis akrual untuk Neraca**, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.;
- (c) **Basis akrual untuk Laporan Operasional**, berarti bahwa pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- (d) **Asas Bruto**, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenankan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Pangandaran menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*);
- 2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*) / kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*) dan basis akrual penuh (*accrual basis*);
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kabupaten Pangandaran adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021);
- 4) Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan dan harta peninggalan sejarah seperti candi;
- 5) Rekening yang digunakan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah;
- 6) Kas:
 - Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas;
 - Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca;
 - Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil Kas Opname di masing-masing bendahara.
- 7) Piutang:
 - Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi;
 - Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan;
 - Piutang dinilai sebesar nilai nominal;
 - Pengakuan Piutang Pajak/Retribusi dicatat atas dasar adanya ketetapan pajak/retribusi yang telah diterbitkan.
- 8) Persediaan:
 - Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :

- Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

➤ Jenis-jenis persediaan :

- Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK;
- Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal *file box*;
- Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan;
- Persediaan untuk dijual atau diserahkan misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dan lainn sebagainya.

9) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.

10) Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan/atau dari sitaan atau rampasan.

Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan:

- Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan;
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap tersebut;

- Kebijakan Penyusutan Aset Tetap telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pangandaran bahwa penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan aset tetap disajikan dalam laporan operasional;
- Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, maka penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian;
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).

11) Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.

Konstruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.

12) Dana Bergulir

Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak ketiga sesuai dengan program pemda. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis/Bank Jabar Cabang Pangandaran. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Tim Teknis/Bank Jabar.

13) Kewajiban Jangka Pendek

Merupakan utang lancar yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.

Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari:

- Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat;
Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca;
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.
- Utang Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*:

- Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada *Lender* melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo;
- Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak;
- *Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

14) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi:

➤ Utang kepada Pemerintah

Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.

➤ Utang Bunga Jangka Panjang

Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

15) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah.

16) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir;

17) Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;

18) Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan;

19) Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan dan ekuitas akhir;

20) Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CALK adalah laporan yang

menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran

- 1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian;
- 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pangandaran meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode;
- 3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- 1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan;
- 2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Pangandaran, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah;
- 5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettoanya;
- 6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan;
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama;

- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut;
- 9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

- 1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran / penilaian dan pengungkapan belanja;
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi;
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan;
- 5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan;
- 6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan;
- 7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
- 8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah;
- 9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah;
- 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya);
- 11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

- 1) Kebijakan akuntansi pembiayaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pembiayaan;
- 2) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada satu periode akuntansi;
- 3) Sumber pembiayaan Pemerintah Kabupaten Pangandaran terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan;
- 4) Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode. Dalam periode berjalan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Pada akhir periode, pengakuan pembiayaan berdasarkan pada jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto;
- 5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran;
- 6) Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pembiayaan.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Aset

- 1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset;
- 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kabupaten Pangandaran tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- 3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Pangandaran namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi;
- 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran;
- 5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi apabila aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;

- 6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia;
- 7) Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan;
- 9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran setelah periode akuntansi berjalan;
- 10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- 11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan;
- 12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah :

- Pendapatan-LO diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah;
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Beban - LO

Beban-LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban :

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa;
- Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah;

- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi;
- Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban transfer, dan beban tak terduga;
- Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit -LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin pada pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan:

- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya;
- Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Realisasi Anggran, dan Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

4.4.10. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang tercerminkan dalam ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB. V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. POS-POS BELANJA- LRA

5.1.1. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada kas di bendahara penerimaan dan rekening kas daerah berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto atau nilai nominal yang tertera pada dokumen bukti penerimaan atau dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai dengan posnya masing-masing, dan tidak mencatat jumlah netto nya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Desember 2023, diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Tahun 2023 Rp. 351.307.964,00 atau mencapai 93,75% dari Target Anggaran Rp. 374.739.700,00 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 Rp. 362.271.324,00. Realisasi Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Pendapatan Daerah	374.739.700	351.307.964	93,75	362.271.302
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	374.739.700	351.307.964	93,75	362.271.302

Tabel 5.1
Pos LRA Pendapatan Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA). PAD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 374.739.700,00 terealisasi sebesar Rp. 351.307.964,00 atau 93,75% dan realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp. 362.271.324,00. Pendapatan asli daerah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dari jenis Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dari 11 perusahaan dengan jumlah Menara 122.

No.	Provider	Alamat	Jumlah Tower
1	PT. CENTRATAMA	Gedung The City Center Batavia Lt. 16, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 126, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. DKI Jakarta 10220	6
2	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	RT.6/RW.1, West Kuningan, Mampang Prapatan, South Jakarta City, Jakarta 12710	80
3	PT. EPID MENARA ASSETCO	Gedung The City Center Batavia Lt. 16, Jl. K.H. Mas Mansyur No. 126, Karet Tengsin, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. DKI Jakarta 10220	1

4	PT. GAMETRAKO TUNGGAL	Jl. Tanah Abang I No.12, RT.11/RW.8, South Petojo, Gambir, Central Jakarta City, Jakarta 10160 (021) 3846488	2
5	PT. GIHON TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Jl. Raya Serpong No.255, Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314 (021) 53161900	1
6	PT. INDOSAT.Tbk	Jl. Medan Merdeka Barat No. 21 (Jln Budi Kemulyaan), Jakarta Pusat, Jakarta 10110, Indonesia	2
7	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA (IBS)	Jl. Riau No.23, RT.9/RW.5, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350	3
8	PT. PROPESSIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	Jl. M.H. Thamrin No.1, RT.1/RW.5, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310	21
9	PT. SOLUSI TUNAS PRATAMA (STP)	Jl. Tentara Pelajar, RT.1/RW.7, Grogol Utara, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210	1
10	PT. TOWER BERSAMA GROUP (TBG)	Jl. Epicentrum Boulevard Barat, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12920	4
11	PT. EDOTCO	Lingkar Mega Kuningan, RT.5/RW.2, Kuningan Timur, Setiabudi, RT.5/RW.2, Kuningan, Kuningan Tim., Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950, Indonesia	1
	JUMLAH		122

Tabel 5.2
Provider Pendapatan Daerah Menara Telekomunikasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas Daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Realisasi Belanja Daerah per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 3.428.782.839,00 atau mencapai 77,26% dari target anggaran sebesar Rp. 4.437.805.656,00 atau berkurang jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Tahun 2022 sebesar Rp. 4.085.992.393,00. Belanja Daerah terdiri dari beberapa jenis belanja dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Operasi	4.310.505.656	3.428.782.839	79.54	4.017.095.828
Belanja Modal	127.300.000	0	0	68.896.565
Jumlah	4.437.805.656	351.307.964	77,26	4.085.992.393

Tabel 5.3
Pos LRA Belanja Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.1.2.1 BELANJA OPERASI

Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 s.d Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.428.782.839,00 atau 77,54 % dari anggaran sebesar Rp.

4.310.505.656,00, sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 4.017.095.828,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	2.712.778.747	2.083.551.951	76.81	2.402.696.717
Belanja Barang dan Jasa	1.597.726.909	1.345.230.888	84.20	1.614.399.111
Jumlah	4.310.505.656	3.428.782.839	79,54	4.017.095.828

Tabel 5.4
Pos LRA Belanja Operasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 adalah sebesar Rp. 2.083.551.951,00 atau 76,81% dari anggaran sebesar Rp. 2.712.778.747,00 sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 2.402.696.717,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.594.854.747	1.372.302.983	86.05	1.328.806.661
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	959.812.000	611.168.968	63.68	910.850.056
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	158.112.000	100.080.000	63.30	163.040.000
Jumlah	2.712.778.747	2.083.551.951	76,81	2.402.696.717

Tabel 5.5
Pos LRA Belanja Pegawai
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 s.d Bulan Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.345.230.888,00 atau 84.20% dari anggaran sebesar Rp. 1.597.726.909,00 sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.614.399.111,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Barang	96.398.934	90.627.902	94.01	129.530.865
Belanja Jasa	1.342.198.975	1.112.206.055	82.86	1.324.605.746
Belanja Pemeliharaan	38.250.000	30.143.125	78.81	17.935.000
Belanja Perjalanan Dinas	120.879.000	112.253.806	92.86	142.327.500
Jumlah	1.597.726.909	1.597.726.909	84,20	1.614.399.111

Tabel 5.6
Pos LRA Belanja Barang dan Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 90.627.902,00 atau 94.01% dari anggaran sebesar Rp. 96.398.934,00 yang merupakan belanja barang pakai habis. Sedangkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp. 129.530.865,00.

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Barang Pakai Habis	96.398.934	90.627.902	94.01	129.530.865
Belanja Bahan-Bahan Kimia	-	-	-	860.000
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	58.166.476	55.490.000	95.40	55.840.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	399.200
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.560.111	10.546.152	99.87	18.661.665
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.744.000	7.062.750	91.20	5.710.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000	3.500.000	100	2.820.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	527.340	518.000	98.23	714.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata	-	-	-	22.500.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	997.007	923.000	92.58	2.059.500
Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.500.000	500.000	33.33	1.888.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.700.000	3.700.000	78.72	14.990.000
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.204.000	888.000	73.75	3.088.000
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	7.500.000	7.500.000	100	-
Jumlah	96.398.934	90.627.902	94,01	129.530.865

Tabel 5.7
Pos LRA Belanja Barang Pakai Habis
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

2. Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.112.206.055,00 atau 82,86% dari anggaran sebesar Rp. 1.342.198.975,00, sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.324.605.746,00. Rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Jasa Kantor	1.231.198.975	1.001.206.055	81.32	1.177.555.746
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	43.050.000
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	111.000.000	111.000.000	100	100.000.000
Jumlah	1.342.198.975	1.112.206.055	82,86	1.324.605.746

Tabel 5.8
Pos LRA Belanja Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 30.143.125,00 atau 78,81% dari anggaran sebesar Rp. 38.250.000,00 yang merupakan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 17.935.000,00. Rincian Belanja Pemeliharaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.250.000	30.143.125	78.81	17.935.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	34.500.000	27.243.125	78.97	11.460.000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor- Bermotor Beroda Dua	-	-	-	550.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin	2.250.000	1.400.000	62.22	3.675.000
Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Komputer	1.500.000	1.500.000	100	2.250.000
Jumlah	38.250.000	30.143.125	78,81	17.935.000

Tabel 5.9
Pos LRA Belanja Barang Pemeliharaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 112.253.806,00 atau 92,86% dari anggaran sebesar Rp. 120.879.00,00, sedangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp. 142.327.500,00. Rincian Belanja Perjalanan Dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	120.879.000	112.253.806	92,86	142.327.500
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Biasa	110.879.000	102.358.806	92.23	83.427.500
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.895.000	9.895.000	100	43.900.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	-	-	-	15.000.000
Jumlah	120.879.000	112.253.806	92,86	142.327.500

Tabel 5.10
Pos LRA Belanja Perjalanan Dinas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.1.2.2 BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 0,00 atau 0% dari anggaran sebesar Rp. 127.300.000,00, sedangkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp. 68.896.565,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	127.300.000	-	-	68.896.565
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	36.896.565
Belanja Modal Komputer	127.300.000	-	-	32.000.000
Jumlah	127.300.000	-	-	68.896.565

Tabel 5.11
Pos LRA Belanja Modal
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5. NERACA

Neraca Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyajikan informasi mengenai Posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2023. Neraca Akhir Tahun Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian per 31 Desember 2023 ditutup dengan Jumlah Aset sebesar Rp. 2.008.453.530,59 atau turun dibandingkan dengan posisi Aset per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.329.154.408,21. Nilai Aset sebesar Rp. 2.008.453.530,59 tersebut, terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.15.000.650,89 Aset Tetap sebesar Rp. 1.975.756.629,70.

5.2.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Saldo Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.008.453.530,59 mengalami penurunan dari saldo Aset tahun sebelumnya sebesar Rp 3.329.154.408,21.

ASET		
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Aset Lancar	15.000.650,89	44.819.691,51
Aset Tetap	1.975.756.629,70	3.247.333.466,70
JUMLAH	2.008.453.530,59	3.329.154.408,21

Tabel 5.12
Pos Neraca Aset
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.2.1.1 ASET LANCAR

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 15.000.650,89 mengalami penurunan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 44.819.691,51. Aset Lancar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2023 terdiri atas Piutang Retribusi Daerah, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan dengan rincian sebagai berikut:

ASET LANCAR			
URAIAN		31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Piutang Retribusi Daerah		20.564.452,40	41.941.634,40
Penyisihan Piutang		(19.853.801,51)	(10.035.572,22)
Beban Dibayar Dimuka		9.250.000	8.333.333,33
Persediaan		5.040.000	4.580.296
JUMLAH		15.000.650,89	44.819.691,51

Tabel 5.13
Pos Neraca Aset Lancar
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.2.1.1.1 Piutang Retribusi Daerah

Akun piutang retribusi daerah menggambarkan hak pemerintah daerah dari pendapatan daerah yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima pendapatannya. Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 20.564.452,40 mengalami penurunan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 41.941.634,40. Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 terdiri dari jenis Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan rincian sebagai berikut:

PIUTANG RETRIBUSI DAERAH			
URAIAN		31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi		20.564.452,40	41.941.634,40
JUMLAH		20.564.452,40	41.941.634,40

Tabel 5.14
Pos Neraca Piutang Retribusi Daerah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.2.1.1.2 Penyisihan Piutang

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (19.853.801,51) mengalami kenaikan dari saldo tahun sebelumnya Rp. (10.035.572,22). Saldo penyisihan piutang terdiri dari Penyisihan Piutang Retribusi dengan rincian sebagai berikut:

PENYISIHAN PIUTANG			
URAIAN		31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Penyisihan Piutang Retribusi		(19.853.801,51)	(10.035.572,22)
JUMLAH		(19.853.801,51)	(10.035.572,22)

Tabel 5.15
Pos Neraca Penyisihan Piutang
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.2.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran SKPD/Pemerintah Daerah yang telah dibayarkan dari kas daerah dan membebani anggaran namun manfaat atas pengeluaran tersebut belum diterima.

Beban Dibayar Dimuka pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik da Persandian berupa pembayaran sewa yang telah dibayar pada tahun 2023, namun sampai dengan 31 Desember 2023 belum diterima manfaat atas jasanya secara penuh.

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 9.250.000,00 mengalami kenaikan dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 8.333.333,33 dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN DIBAYAR DIMUKA		
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Sewa Gedung Kantor	9.250.000	8.333.333,33
JUMLAH	9.250.000	8.333.333,33

Tabel 5.16
Pos Neraca Beban Dibayar Dimuka
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.2.1.1.4 **Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD/Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan merupakan saldo hasil pemeriksaan fisik persediaan (stock opname) per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 5.040.000,00 dan Rp. 4.580.296,00 dengan rincian sebagai berikut:

PERSEDIAAN		
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Alat Tulis Kantor	1.841.000	4.197.296
Bahan Cetak	3.000.000	-
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	199.000	383.000
JUMLAH	5.040.000	4.580.296

Tabel 5.17
Pos Neraca Persediaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

Saldo persediaan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 4.580.296,00.

5.2.1.2 **ASET TETAP**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk fasilitas umum/sosial.

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.975.756.629,70 dan Rp. 3.247.333.466,70 yang terdiri atas Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. Dari keenam jenis aset tetap tersebut, terdapat 4 jenis aset tetap yang disusutkan yaitu Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Gedung dan Bangunan, Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutan. Metode penyusutan yang digunakan yaitu metode garis lurus atau nilai penyusutan diberlakukan sama setiap tahun sampai masa manfaat aset tersebut habis. Berikut adalah rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022.

ASET TETAP		
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Peralatan dan Mesin	6.716.821.007,70	6.730.131.307,70
Gedung dan Bangunan	1.133.797.000	1.133.797.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	189.228.600	189.228.600
Aset Tetap Lainnya	117.025.000	117.025.000
Akumulasi Penyusutan	(6.181.114.978)	(4.922.848.441)
JUMLAH	1.975.756.629,70	3.247.333.466,70

Tabel 5.18
Pos Neraca Aset Tetap
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

Terdapat penurunan Aset Tetap sebesar Rp. 2.529.843.374,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.247.333.466,70. Penyebab penurunan Aset Tetap tersebut disebabkan adanya mutasi tambah dan mutasi kurang Aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2022	MUTASI		SALDO AKHIR PER 30 DESEMBER 2023 (UN-AUDITED)
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
Peralatan dan Mesin	6.730.131.307,70	-	1.271.576.837	6.716.821.007,70
Gedung dan Bangunan	1.133.797.000	-	-	1.133.797.000
Jalan, Irigasi dan Jaringan	189.228.600	-	-	189.228.600
Aset Tetap Lainnya	117.025.000	-	-	117.025.000
Akumulasi Penyusutan	(4.922.848.441)	(1.258.266.537)	-	(6.181.114.978)
Jumlah	3.247.333.466,70	(1.258.266.537)	1.271.576.837	1.975.756.629,70

Tabel 5.19
Pos Neraca Rincian Mutasi Aset Tetap
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.2.1.2.1 Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 6.716.821.007,70 mengalami penurunan sebesar Rp. 13.310.300,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 6.730.131.307,70.

URAIAN	SALDO AWAL PER 31 DESEMBER 2022	MUTASI		SALDO AKHIR PER 30 DESEMBER 2023 (UN-AUDITED)
		PENAMBAHAN	PENGURANGAN	
Alat Angkutan	561.407.317,70	-	-	561.407.317,70
Alat Bengkel dan Alat Ukur	6.050.000	-	-	6.050.000
Alat Kantor dan Rumah Tangga	854.277.536	-	11.812.800	842.464.736
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.662.442.872	-	1.497.500	2.660.945.372
Alat Laboratorium	286.634.918	-	-	286.634.918
Alat Persenjataan	21.882.519	-	-	21.882.519
Komputer	2.337.436.145	-	-	2.337.436.145
Jumlah	6.730.131.307,70	-	13.310.300	6.716.821.007,70

Tabel 5.20
Pos Neraca Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

Penjelasan penambahan dan pengurangan saldo Peralatan dan Mesin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

	Saldo Awal per 01 Januari 2023	Rp	Nilai
Penambahan			
1		Rp	
Pengurangan			
1	Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Barang Extracomtable	Rp	13.310.300,00
	Jumlah Pengurangan	Rp	13.310.300,00

5.2.1.2.2 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 1.133.797.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.133.797.000,00 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

5.2.1.2.3 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 189.228.600,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 189.228.600,00 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

5.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 sebesar Rp. 117.025.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 117.025.000,00 tidak ada penambahan atau pengurangan aset.

5.2.1.2.5 Akumulasi Penyusutan

Saldo Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Perhitungan Penyusutan berdasarkan pendekatan bulanan, dengan Laporan Penyusutan secara Semesteran.

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (6.181.114.978,00) yang diterapkan pada 3 jenis aset tetap yaitu Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Penyusutan	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)
Peralatan dan Mesin	(6.038.692.083)	(4.815.078.091)	(1.223.613.992)
Gedung dan Bangunan	(115.741.777)	(87.396.852)	(28.344.925)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(26.681.118)	(20.373.498)	(6.307.620)
Jumlah	(6.181.114.978)	(4.922.848.441)	(1.258.266.537)

Tabel 5.21
Pos Neraca Rincian Akumulasi Penyusutan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.2.1.3 Aset Lainnya

Aset Lainnya termasuk dalam kategori Aset Non Lancar lainnya, termasuk didalamnya aset tak berwujud dan akumulasi amortisasi asset tidak berwujud.

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 17.696.250,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 19.305.000,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 37.001.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

ASET LAINNYA			
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/Penurunan
Aset Tidak Berwujud	758.851.426	758.851.426	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(741.155.176)	(721.850.176)	19.305.000
JUMLAH	17.696.250	37.001.250	19.305.000

Tabel 5.22
Pos Neraca Rincian Aset Lainnya
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual, meliputi:

1. Software computer;
2. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 758.851.426,00 sedangkan tahun sebelumnya Rp. 758.851.426,00, tidak adanya penambahan maupun pengurangan saldo asset tidak berwujud.

5.2.1.3.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Amortisasi Aset Tidak Berwujud adalah proses di mana pembelian aset tak berwujud non-fisik dibebankan secara bertahap sesuai asumsi masa manfaatnya.

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (741.155.176,00) mengalami kenaikan sebesar Rp. 19.305.000,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. (721.850.176,00) dengan rincian sebagai berikut:

AKUMULASI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD			
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/Penurunan
Software	642.816.426	642.816.426	-
Kajian	98.338.750	79.033.750	19.305.000
JUMLAH	741.155.176	721.850.176	19.305.000

Tabel 5.23
Pos Neraca Rincian Amortisasi Aset Tidak Berwujud
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.2.2 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

5.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 390.800.426,20 mengalami kenaikan sebesar Rp. 344.287.779,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 46.512.647,20. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/Penurunan
Pendapatan Diterima Dimuka	317.291,20	317.291,20	-
Utang Belanja	390.483.135	46.195.356	344.287.779
JUMLAH	390.800.426,20	46.512.647,20	344.287.779

Tabel 5.24
Pos Neraca Kewajiban Jangka Pendek
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.2.2.1.1 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan pajak/retribusi/pendapatan yang sah lainnya yang sudah diterima di rekening kas daerah tetapi belum menjadi hak pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan.

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 317.291,20 yang merupakan pendapatan retribusi pengendalian Menara telekomunikasi atas nama PT. IBS yang kelebihan bayar pada tahun 2022, namun saat penagihan retribusi pada tahun 2023 PT. IBS membayar senilai retribusi terhutang. Sehingga nilai pendapatan diterima dimuka masih tetap ada.

PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA			
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/Penurunan
Retribusi Menara Telekomunikasi	317.291,20	317.291,20	-

JUMLAH	317.291,20	317.291,20	-
--------	------------	------------	---

Tabel 5.25
Pos Neraca Pendapatan Diterima Dimuka
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.2.2.1.2 Utang Belanja

Utang Belanja adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi sampai akhir periode belum dibayar dan belum dicatat dalam akun yang bersangkutan. Oleh karena itu pada akhir periode akuntansi perlu diadakan penyesuaian agar biaya dapat dibebankan pada periode yang bersangkutan.

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 390.483.135,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 344.287.779,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 46.195.356,00. Utang Belanja pada Tahun 2023 terdiri atas Utang Belanja Pegawai dan Utang Belanja Barang dan Jasa. Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

UTANG BELANJA			
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/Penurunan
Utang Belanja Pegawai	233.361.804	33.227.078	200.134.726
Utang Belanja Barang dan Jasa	157.121.331	12.968.278	144.153.053
JUMLAH	390.483.135	46.195.356	344.287.779

Tabel 5.26
Pos Utang Belanja
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 233.361.804,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 200.134.726,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp33.227.078,00. Rincian Utang Belanja Pegawai pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

UTANG BELANJA PEGAWAI			
URAIAN	Penyedia	No. SPM	Nilai SPM
Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bulan Desember 2023 Bagian 2	Pegawai PNS DISKOMINFO	00075/SPM-LS/ 2.16.2.20.2.21.01./ B02/2023	32.646.612
Pembayaran TPP Oktober Kinerja Bulan September 2023 (Beban Kerja)	Pegawai PNS DISKOMINFO	00088/SPMLS/2.16.2.20.2.21.01./ B02/2023	53.536.000
Pembayaran TPP Oktober Kinerja Bulan September 2023 (Prestasi Kerja)	Pegawai PNS DISKOMINFO	00088/SPMLS/2.16.2.20.2.21.01./ B02/2023	13.351.800
Pembayaran TPP November Kinerja Bulan Oktober 2023 (Beban Kerja)	Pegawai PNS DISKOMINFO	00090/SPMLS/2.16.2.20.2.21.01./ B02/2023	53.536.000
Pembayaran TPP November Kinerja Bulan Oktober 2023 (Prestasi Kerja)	Pegawai PNS DISKOMINFO	00090/SPMLS/2.16.2.20.2.21.01./ B02/2023	13.384.000

Pembayaran TPP Desember Kinerja Bulan November 2023 (Beban Kerja)	Pegawai PNS DISKOMINFO	00092/SPM-LS/2.16.2.20.2.21.01./B02/2023	53.536.000
Pembayaran TPP Desember Kinerja Bulan November 2023 (Prestasi Kerja)	Pegawai PNS DISKOMINFO	00092/SPMLS/2.16.2.20.2.21.01./B02/2023	13.371.392
JUMLAH			233.361.804

Tabel 5.27
Pos Utang Belanja Pegawai
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 157.121.331,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 144.153.053,00 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 12.968.278,00. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa pada Tahun 2023 sebagai berikut:

UTANG BELANJA BARANG DAN JASA			
URAIAN	Penyedia	No. SPM	Nilai SPM
TU Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Honor Non PNS)	TESYA SRI SEPTIANI	00077/SPM-TU/2.16.2.20.2.21.01./B20/2023	7.650.000
TU Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Honor Non PNS)	HERNI ASMAA MUTHAINNAH	00078/SPM-TU/2.16.2.20.2.21.01./B20/2023	7.650.000
TU Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Honor Non PNS)	INDIRA ZAMALINA C.S	00079/SPM-TU/2.16.2.20.2.21.01./B20/2023	7.650.000
TU Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Honor Non PNS)	DINAR NURYANI	00080/SPM-TU/2.16.2.20.2.21.01./B20/2023	7.200.000
TU Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Honor Non PNS)	WIDA AYUDITHA	00081/SPM-TU/2.16.2.20.2.21.01./B20/2023	6.300.000
TU Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor Non PNS) - Tenaga Kebersihan	PARSIM	00082/SPM-TU/2.16.2.20.2.21.01./B20/2023	6.300.000
TU Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor Non PNS) - Tenaga Keamanan	ADI BAGUS HARTANTO MOCH. TAUFIK JATNIKA FIRMANSYAH	00082/SPM-TU/2.16.2.20.2.21.01./B20/2023	18.900.000
TU Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Honor Non PNS) - Tenaga Supir	RESTU GALIH	00082/SPM-TU/2.16.2.20.2.21.01./B20/2023	8.100.000
TU Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Honor Non PNS)	AI KARTINI	00083/SPM-TU/2.16.2.20.2.21.01./B22/2023	5.850.000

TU Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik (Honor Non PNS)	NADYA OKTAVIA WULANDARI	00084/SPM- TU/2.16.2.20.2.21 .01./B22/2023	5.850.000
TU Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik (Honor Non PNS)	IQBAL MUHAMMAD F.N SYAEFUL MALIK YANA HERDIANA	00085/SPM- TU/2.16.2.20.2.21 .01./B21/2023	40.500.000
TU Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah (Honor Non PNS)	DIKA SETIA PRATAMA ANGGA PERMANA MOCH. NURHOLIS MAJID	00086/SPM- TU/2.16.2.20.2.21 .01./B21/2023	20.250.000
TU Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Dacrah Kabupaten/Kota (Honor Non PNS)	RETY APRISSA DEWI	00087/SPM- TU/2.16.2.20.2.21 .01./B21/2023	6.300.000
Utang Belanja Tagihan Listrik	PLN		7.658.181
Utang Belanja Tagihan Internet	TELKOM		963.150
JUMLAH			157.121.331

Tabel 5.28
Pos Utang Belanja Barang dan Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.2.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.617.653.104,39 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.664.988.656,62 dari saldo Ekuitas tahun lalu sebesar Rp. 3.282.641.761,01 yang didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

EKUITAS			
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/Penurunan
Aset	2.008.453.530,59	3.329.154.408,21	1.320.700.877,62
Kewajiban	390.800.426,20	46.512.647,20	344.287.779
JUMLAH	1.617.653.104,39	3.282.641.761,01	1.664.988.656,62

Tabel 5.29
Pos Neraca Ekuitas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.3 LAPORAN OPERASIONAL

Penjelasan akun-akun Laporan Operasional (LO) menguraikan secara singkat mengenai saldo-saldo akun LO untuk periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana disajikan pada muka laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Laporan Operasional (LO) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menyajikan berbagai unsur Beban-LO, Surplus/Defisit dari Operasi yang merupakan output dari

diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa Beban Pendapatan-LO Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian per 31 Desember 2023 ditutup dengan nilai sebesar Rp. 329.930.394.782,00, Beban Daerah Rp. 5.069.590.472,62 dan memiliki nilai Surplus/Defisit sebesar Rp. (4.739.659.690,62).

5.3.1 KEGIATAN OPERASIONAL

5.3.1.1 PENDAPATAN – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional diakui saat timbulnya hak atau saat pendapatan direalisasikan.

Pendapatan - LO pada per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp. 329.930.782,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (54.431.946,00) atau 14,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 384.362.728,00 dengan rincian sebagai berikut:

PENDAPATAN DAERAH – LO				
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	329.930.782	384.362.728	(54.431.946)	(14,16)
Pendapatan Retribusi Daerah	329.930.782	384.362.728	(54.431.946)	(14,16)
JUMLAH	329.930.782	384.362.728	(54.431.946)	(14,16)

Tabel 5.30
Pos Pendapatan Daerah - LO
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.3.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 329.930.782,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (54.431.946,00) atau 14,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 384.362.728,00. Penurunan tersebut merupakan Penurunan dari sektor PAD Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO hanya terdapat dari Pendapatan Retribusi Daerah Menara Telekomunikasi.

5.3.1.1.1.1 PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH – LO

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan hak yang akan dan/atau sudah diterima oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian atas pungutan wajib terhadap objek retribusi yang dikenakan kepada subjek retribusi yang nilainya ditetapkan terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah dalam SKRD atau dokumen sejenis lainnya (*official assessment*).

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 329.930.782,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (54.431.946,00) atau 14,16% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 384.362.728,00.

5.3.1.2 BEBAN DAERAH

Realisasi Beban Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 5.069.590.472,62. Sedangkan realisasi Beban Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 5.292.424.604,36 mengalami penurunan sebesar Rp. (222.834.131,74) atau (4,21)%. Beban Daerah terdiri dari Beban Operasi dan Beban Penyusutan dan Amortisasi dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN DAERAH – LO				
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Operasi	3.781.512.476,62	3.863.036.039,36	(81.523.562,74)	(2,11)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.288.077.996	1.429.388.565	(141.310.569)	(9,89)
JUMLAH	5.069.590.472,62	5.292.424.604,36	(222.834.131,74)	(4,21)

Tabel 5.31
Pos Beban Daerah - LO
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.3.1.2.1 BEBAN OPERASI

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Operasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.781.512.476,62 mengalami penurunan sebesar Rp. (81.523.562,74) atau 2,11% dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.863.036.039,36. Beban Operasional Tahun 2023 terdiri atas 6 jenis beban dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN OPERASI				
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pegawai	2.283.686.677	2.236.848.484	46.838.193	2,09
Beban Barang	90.168.198	131.922.069	(41.753.871)	(31,65)
Beban Jasa	1.255.442.441,33	1.329.411.057	(73.968.615,67)	(5,56)
Beban Pemeliharaan	30.143.125	17.935.000	12.208.125	68,07
Beban Perjalanan Dinas	112.253.806	142.327.500	(30.073.694)	(21,13)
Beban Penyisihan Piutang	9.818.229,29	4.591.929,36	5.226.299,93	113,81
JUMLAH	3.781.512.476,62	3.863.036.039,36	(81.523.562,74)	(2,11)

Tabel 5.32
Pos Rincian Beban Operasi
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.3.1.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.283.686.677,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 46.838.193,00 atau 2,09% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp. 2.236.848.484,00. Rincian beban pegawai adalah sebagai berikut:

BEBAN PEGAWAI				
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.382.842.517	1.311.791.320	71.051.197	5,42
Beban Tambahan Penghasilan ASN	811.884.160	787.707.164	24.176.996	3,07
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	88.960.000	137.350.000	(48.390.000)	(35,23)
JUMLAH	2.283.686.677	2.236.848.484	46.838.193	(2,09)

Tabel 5.33
Pos Rincian Beban Pegawai
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.3.1.2.1.2 Beban Barang

Beban Barang per 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp. 90.168.198,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 41.753.871,00 atau 31,65% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp. 131.922.069,00. Rincian beban barang adalah sebagai berikut :

BEBAN BARANG				
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Barang Pakai Habis				
Beban Bahan-Bahan Kimia	0	1.250.000	(1.250.000)	(100)
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	55.490.000	55.840.000	(350.000)	(0,63)
Beban Bahan-Bahan Lainnya	0	399.200	(399.200)	(100)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.902.448	19.091.369	(6.188.921)	(32,42)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	4.062.750	7.100.500	(3.037.750)	(42,78)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.500.000	2.900.000	600.000	20,69
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	518.000	714.000	(196.000)	(27,45)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Souvenir/Cendera Mata	0	22.500.000	(22.500.000)	(100)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.107.000	2.021.000	(914.000)	(45,23)
Beban Natura dan Pakan-Natura	500.000	2.028.000	(1.528.000)	(75,35)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	3.700.000	14.990.000	(11.290.000)	(75,32)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	888.000	3.088.000	(2.200.000)	(71,24)
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	7.500.000	0	7.500.000	100
JUMLAH	90.168.198	1.621.595.626	(41.753.871)	(31,65)

Tabel 5.34
Pos Rincian Beban Barang
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.3.1.2.1.3 **Beban Jasa**

Beban Jasa per 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.255.442.441,33 mengalami penurunan sebesar Rp. (73.968.615,67) atau 5,56% dari beban jasa tahun sebelumnya sebesar Rp. 1.329.411.057,00. Rincian beban jasa adalah sebagai berikut:

BEBAN JASA				
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Jasa Kantor	1.145.359.108	1.182.361.057	(37.001.949)	(3,13)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0	43.050.000	(43.050.000)	(100)
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	110.083.333,33	104.000.000	6.083.333,33	5,85
JUMLAH	1.255.442.441,33	1.329.411.057	(73.968.615,67)	(5,56)

Tabel 5.35
Pos Rincian Beban Jasa
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.3.1.2.1.4 **Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 30.143.125,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.935.000,00 atau 68,07% dari beban pemeliharaan tahun sebelumnya sebesar Rp. 12.208.125,00 dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN PEMELIHARAAN				
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	11.460.000	(11.460.000)	(100)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	27.243.125	0	27.243.125	100
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Dua	0	550.000	(550.000)	(100)
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.400.000	3.675.000	(2.275.000)	(61,90)
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.500.000	2.250.000	(750.0000)	(33,33)
JUMLAH	30.143.125	17.935.000	12.208.125	68,07

Tabel 5.36
Pos Rincian Beban Pemeliharaan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.3.1.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp. 112.253.806,00 mengalami penurunan sebesar Rp. (30.073.694) atau 21,13% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 142.327.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

BEBAN PERJALANAN DINAS				
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
Beban Perjalanan Dinas Biasa	102.358.806	83.427.500	18.931.306	22,69
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.895.000	43.900.000	(34.005.000)	(77,46)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	15.000.000	(15.000.000)	(100)
JUMLAH	112.253.806	142.327.500	(30.073.694)	(21,13)

Tabel 5.37
Pos Rincian Beban Perjalanan Dinas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.3.1.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp. 9.818.229,29 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.226.299,93 atau 113,81% dari beban tahun sebelumnya sebesar Rp. 4.591.929,36. Beban Penyisihan piutang tahun 2023 dicatat di beban Penyisihan piutang. Rincian beban penyisihan piutang adalah sebagai berikut:

BEBAN PENYISIHAN PIUTANG				
URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah				
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	9.818.229,29	4.591.929,36	5.226.299,93	113,81
JUMLAH	9.818.229,29	4.591.929,36	5.226.299,93	113,81

Tabel 5.38
Pos Rincian Beban Penyisihan Piutang
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.3.2 SURPLUS DEFISIT LO

Surplus/Defisit per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp. (4.739.659.690,62) mengalami penurunan sebesar Rp. 168.402.185,74 atau 3,43% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. (4.908.061.876,36). Surplus/Defisit-LO Tahun 2023 didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:

1. Pendapatan – LO	329.930.782,00
2. Beban	<u>5.069.590.472,62</u>
Surplus/Defisit - LO	(4.739.659.690,62)

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan

Perubahan Ekuitas, yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus/defisit dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Laporan operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
EKUITAS AWAL	3.282.641.761,01	3.282.641.761,01
Surplus/Defisit-LO	(4.739.659.690,62)	0
RK PPKD	3.077.474.875	0
Dampak Kumulatif-Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.506.459	0
Dampak Kumulatif Pencatatan Nilai Peralatan dan Mesin	(13.310.300)	0
JUMLAH	1.617.653.104,39	3.282.641.761,01

Tabel 5.39
Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.4.1 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp. 3.282.641.761,01 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.222.395.344,96 dari saldo ekuitas awal tahun sebelumnya sebesar Rp. 4.505.037.105,97. Ekuitas Awal per 01 Januari 2023 diperoleh dari saldo ekuitas per 31 Desember 2023 di Neraca (audited).

5.4.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Penyajian nominal Surplus/Defisit-LO berasal dari Laporan Operasional yang merupakan penjumlahan selisih lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang menambah nilai ekuitas pada neraca.

Surplus/Defisit per 31 Desember Tahun 2023 adalah sebesar Rp. (4.739.659.690,62) mengalami penurunan sebesar Rp. 168.402.185,74 atau 3,43% dari tahun sebelumnya sebesar Rp. (4.908.061.876,36), dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Pendapatan – LO	329.930.782,00
2. Beban - LO	5.069.590.472,62
Surplus/Defisit - LO	(4.739.659.690,62)

5.4.3 RK PPKD

RK PPKD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 3.077.474.875,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 646.246.194,00 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.723.721.069,00. RK PPKD merupakan perhitungan dari realisasi belanja daerah sebesar Rp. 3.428.782.839,00 dikurangi jumlah realisasi pendapatan daerah sebesar Rp. 351.307.964,00.

5.4.4 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN MENDASAR

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Nilai dampak kumulatif perubahan mendasar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (2.803.841,00) nilai tersebut didapatkan dari 2 jenis dampak kumulatif dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022
Dampak Kumulatif-Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	10.506.459	0
Dampak Kumulatif Pencatatan Nilai Peralatan dan Mesin	(13.310.300)	0
JUMLAH	(2.803.841)	0

Tabel 5.40
Pos Dampak Kumulatif (LPE)
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Tahun 2023

5.4.4.1 Dampak Kumulatif-Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan adalah jumlah total dari biaya aset yang sudah dialokasikan ke beban penyusutan sejak aset mulai digunakan. Akumulasi penyusutan ini terdiri pada aset yang dibangun misalnya berupa bangunan, perabotan, peralatan kantor, mesin, kendaraan, perlengkapan dan lain sebagainya. Nilai Dampak Kumulatif-Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah sebesar Rp. 10.506.459,00 nilai tersebut didapatkan karena adanya reklas aset tetap ke Extracompatable dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	
Alat Kantor Lainnya	555.333,00
Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	
Mebel	5.257.540,00
Alat Dapur	510.000,00
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.524.012,00
Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabata	
Kursi Kerja Pejabat	1.564.000,00
Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Alat Studio Lainnya	
Peralatan Studio Video dan Film	665.834,00
Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	
Personal Computer	429.740,00
JUMLAH	10.506.459

5.4.4.2 Dampak Kumulatif Pencatatan Nilai Peralatan dan Mesin

Nilai Dampak Kumulatif Pencatatan Nilai Peralatan dan Mesin untuk periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. (13.310.300,00), nilai tersebut didapatkan karena adanya Reklasifikasi dari Aset Tetap menjadi Barang Extracompatable dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	(980.000,00)
Mebel	(5.539.000,00)
Alat Dapur	(510.000,00)
Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	(2.023.800,00)
Kursi Kerja Pejabat	(2.760.000,00)
Peralatan Studio Video dan Film	(1.497.500,00)
JUMLAH	(13.310.300)

5.4.5 EKUITAS AKHIR

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.617.653.104,39 didapatkan dari perhitungan berikut :

Ekuitas Awal	Rp	3.282.641.761,01
Surplus/Defisit-LO	Rp	(4.739.659.690,62)
RK PPKD	Rp	3.007.474.875,00
Dampak Kumulatif-Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	10.506.459,00
Dampak Kumulatif Pencatatan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp	(13.310.300,00)
Ekuitas Akhir	Rp	1.617.653.104,39

BAB. VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 Tugas dan Fungsi Organisasi Unit Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakerja sebagai berikut :

Kedudukan Dinas merupakan wilayah kerja Dinas sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Bupati kepada Kepala Dinas untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan Perumusan kebijakan teknis dinas;
- b. Mengkoordinasikan perumusan dan penetapan rencana kerja;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan indicator kinerja utama;
- d. Mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis;
- e. Memverifikasi rencana Layanan E-Government, Pengelolaan Infrstruktur dan Statistik, dan Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian;
- f. Mengkoordinasikan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah;
- g. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- h. Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan daerah, yang meliputi aspek: Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi penetapan penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan, dan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam Pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Pejabat Struktural, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub. Bagian

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Unit Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagaimana telah diubah Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Susunan Organisasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Kabid Aplikasi, Informatika dan Persandian;

- d. Kabid Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
- e. Kasi Statistik Sektoral;
- f. Kasubag Program dan Keuangan;
- g. Kasubag Umum dan Kepegawaian;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Staf.

Data Pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Per 31 Desember 2023 yaitu :

- PNS sebanyak 22 Orang;
- Non PNS sebanyak 19 Oarang.

No	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
Data PNS			
1	Jaja Nurulhuda, ST., M.Dev.Plg	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2	Drs, Sarno, MT	Pembina Utama Muda, IV/c	Perekayasa Ahli Madya
3	Rohaeni, SH., MM	Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
4	Dudung Cahyadi, S.Pd., M.Pd	Pembina Tk. I, IV/b	Kabid Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik
5	Benny, S.Sos	Pembina, IV/a	Kabid Aplikasi, Informatika dan Persandian
6	Sri Furwaningsih, S.Hut., M.I.L	Pembina, IV/a	Kasi Statistik Sektoral
7	Marlia Herlia, S.IP	Penata, III/c	Kasubag Program dan Keuangan
8	Thoyib Wahyudin, S.Kom	Penata, III/c	Pranata Komputer Ahli Muda
9	Ifan Muhamad Sofyan, S.T	Penata Muda Tk.I, III/b	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10	Iqbal Aditya Pangestu, S.Kom	Penata Muda Tk.I, III/b	Analisis Statistik
11	Yogi Sulistia, S.Kom	Penata Muda, III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama
12	Danil Fathurrohman, S.Kom	Penata Muda, III/a	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi
13	Yanuar Dwi Jatmiko Wismoaji, S.T	Penata Muda, III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama
14	Ami Gatra Yudhono, S.Kom	Penata Muda, III/a	Pranata Komputer Ahli Pertama
15	Reza Imam Malik, S.Si	Penata Muda, III/a	Analisis Statistik
16	Suciati Intan Henidar, S.Ds	Penata Muda, III/a	Perancang Grafis
17	Adam Kusumah Firdaus, S.T	Penata Muda, III/a	Analisis Sistem Informasi
18	Satria Hanafie, S.T	Penata Muda, III/a	Analisis Sistem Informasi
19	Muhammad Rifki Prathama Ubaidillah, S.Kom	Penata Muda, III/a	Analisis Tata Kelola Keamanan Siber
20	Shabrina Larasati R, A.Md	Pengatur, II/c	Pengelola Data Statistik
21	Nandito Tri Septian, A.Md	Pengatur, II/c	Pengolah Data dan Informasi
22	Enok Saripah	Pengatur Muda, II/a	Pengadministrasi Perkantoran
Data Non PNS			
1	Adi Bagus Hartanto	Non PNS	Tenaga Keamanan
2	Ai Kartini	Non PNS	Operator PLID
3	Angga Permana	Non PNS	Operator Command Center
4	Dika Setia Pratama	Non PNS	Operator Command Center
5	Dinar Nuryani	Non PNS	Operator Pendapatan
6	Herni Asmaa Muthmainnah	Non PNS	Operator Keuangan

7	Indira Zamalina Suci Caesari	Non PNS	Operator BMD
8	Iqbal Muhammad Fajar N.	Non PNS	Programmer
9	Jatnika Firmansyah	Non PNS	Tenaga Keamanan
10	Moch Taufik Ramdhany	Non PNS	Tenaga Keamanan
11	Nadya Oktavia Wulandari	Non PNS	Tenaga Runner/Peliput
12	Parsim	Non PNS	Tenaga Kebersihan
13	Restu Galih	Non PNS	Supir/Pengemudi
14	Rety Aprissa Dewi	Non PNS	Operator Persandian
15	Syaeful Malik	Non PNS	Programmer
16	Tesya Sri Septiani	Non PNS	Operator Perencanaan
17	Wida Ayuditha	Non PNS	Operator Kepegawaian
18	Yana Herdiana	Non PNS	Programmer
19	Moch. Nurholis Majid	Non PNS	Operator Command Center

Tabel 6.1
Daftar Pegawai PNS dan Non PNS
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
2023

BAB. VII
PENUTUP

Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2023 yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Pangandaran per 31 Desember 2023 sehingga diharapkan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas.

Semoga dengan tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023 ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan Kinerja Keuangan Lingkup Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian Kabupaten Pangandaran.

Parigi, 02 Januari 2024
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN



JAJA NURULHUDA, ST., M.Dev.Plg
Pembina Utama Muda, IV/c